

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN & AKRONIM	xiv
INTISARI.....	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Sistem Presidensial	20
B. Kekuasaan Legislasi Presiden	31
C. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	36
1. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966	36
2. TAP MPR No. III/MPR/2000	40

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004	42
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	45
D. Peraturan Presiden (Perpres)	50
E. Landasan Teori.....	56
1. Teori Pembatasan Kekuasaan	57
2. Teori Perundang-undangan.....	67
3. Teori Kewenangan	74
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Jenis dan Sifat Penelitian	82
B. Data Penelitian	84
C. Alat Penelitian	86
D. Jalannya Penelitian	86
E. Analisis Hasil Penelitian.....	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Pertimbangan Hukum Perluasan Substansi Peraturan Presiden (Perpres) di Indonesia	89
1. Ratio Legis Perluasan Materi Muatan Peraturan Presiden.....	89
2. Perkembangan Historis terbentuknya Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia	95
3. Perdebatan Yuridis Materi Muatan Peraturan Presiden Saat Pembahasan Rancangan Undang-Undang.....	109
B. Implikasi Perluasan Materi Muatan Peraturan Presiden (Perpres) di Indonesia.....	142

1. Implikasi Perluasan Materi Muatan Peraturan Presiden (Perpres) dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	142
2. Dampak Perluasan Materi Muatan Peraturan Presiden (Perpres) terhadap Kekuasaan Presiden di Indonesia	165
BAB V PENUTUP	196
A. Kesimpulan.....	196
1. Pertimbangan Hukum Perluasan Substansi Peraturan Presiden (Perpres) di Indonesia	196
2. Dampak Perluasan Materi Muatan Peraturan Presiden (Perpres) terhadap Kekuasaan Presiden di Indonesia	198
B. Saran	201
DAFTAR PUSTAKA.....	203